

RENCANA KERJA

BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Tahun 2017



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, karunia serta perkenan-Nya Biro Pengendalian Pembangunan telah mampu menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja tahun 2017.

Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan tahun 2017 adalah sebuah dokumen rencana tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana strategis, dalam rangka mengukur keberhasilan kerja Biro Pengendalian Pembangunan tahun 2017.

Dokumen ini tentunya mengacu kepada pencapaian indikator makro Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terakumulasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini dilakukan melalui tahapan - tahapan dengan memperhatikan capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2016.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh staf Biro Pengendalian Pembangunan yang telah memberi masukan dan sarannya, juga kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung,

2017

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN LALU	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	5
2.2 ANALISIS KINERJA LAYANAN BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	12
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	18
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	23
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONA;	23
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	23
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
BAB IV PENUTUP	29



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2016	10
TABEL 2.2	REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	13
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018	21
TABEL 3.3	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2018	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan Biro Pengendalian Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan dan rancangan awal RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan ini adalah sebagai acuan bagi Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2017 dan Renstra Biro Pengendalian Pembangunan 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai Visi Jangka Menengah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri A);
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
- 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E).



- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54)
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 19 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 20 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja dan profesionalisme serta penganggaran Tahun 2017.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengendalian Pembangunan tahun 2017 adalah :

- Tersedianya pedoman untuk rujukan penyusunan Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan;
- Adanya ukuran keberhasilan tahunan untuk Biro Pengendalian Pembangunan
- Memacu dan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk pencapaian indikator kinerja
- Meningkatkan kinerja perorangan maupun Biro Pengendalian Pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN TAHUN LALU



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2016 dan Capaian Renstra Biro Pengendalian Pembangunan
- 2.2 Analisis Kinerja Layanan Biro Pengendalian Pembangunan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pengendalian Pembangunan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pengendalian Pembangunan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pengendalian Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Pengendalian Pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, pencapaian target Renstra Biro Pengendalian Pembangunan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2016, dapat dilihat dalam tabel 2.1 pada lampiran dibawah ini.

Program Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 3 (Tiga) Program, meliputi :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provins Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp331.797.100,00 atau 94,80%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui Evaluasi dan Estimasi. *Outcome* kegiatan adalah tercapainya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran.
- 2) Kegiatan Asistensi RKA/DPA SKPD, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.575.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp160.975.000,00 atau 84,91%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Asistensi dan Verifikasi RKA/DPPA SKPD Perubahan Tahun 2016 dan RKA/DPA SKPD Tahun 2017, dan Terlaksana Verifikasi DPA SKPD APBD Tahun 2016. *Outcome* kegiatan adalah Terasistensinya dan Terverifikasinya penyusunan RKA/DPPA SKPD Perubahan Tahun



2016, RKA/DPA SKPD Tahun 2017 serta Terverifikasinya DPA SKPD APBD Tahun 2016.

- 3) Kegiatan Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp221.834.800,00 atau 88.73%. *Output* kegiatan adalah terwujudnya sinergitas pengendalian pembangunan lingkup OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Data Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.
- 4) Kegiatan Penguatan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp484.772.991,00 atau 69,25%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi, dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan asisten bidang ekonomi dan pembangunan.
- 5) Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp872.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp871.663.900,00 atau 99,96%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya monitoring kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Fisik. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan monitoring bidang Fisik.
- 6) Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.011.425.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.008.909.050,00 atau 99,75%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya monitoring kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Ekonomi. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan monitoring bidang Ekonomi.
- 7) Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar



Rp905.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp886.160.539,00 atau 97,92%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya monitoring kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Sosial Budaya. *Outcome* kegiatan tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi.

- 8) Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp920.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp913.898.114,00 atau 99,34%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya monitoring kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat khususnya bidang Pemerintahan. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan monitoring bidang Pemerintahan.

b) Permasalahan dan Solusi

- Ketidaksiplinan OPD/Biro dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Bulanan (terlambat/tidak menyampaikan). Untuk itu telah disampaikan Surat Edaran ke OPD/Biro agar menyampaikan Laporan Capaian Kinerja tepat pada waktunya.
- Ketidaksiplinan OPD/Biro dalam kehadiran Desk Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, telah disampaikan Surat Peringatan kepada OPD/Biro terkait kehadiran Desk Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp1.233.962.582,00 atau 84,93%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan.



b) Permasalahan dan Solusi

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan bersifat penyediaaan terhadap kebutuhan operasional Biro Administrasi Pembangunan, sehingga tingkat penyerapan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional kegiatan yang dilaksanakan.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp59.810.950,00 atau 99,68%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya DPA Biro Administrasi Pembangunan, tersusunnya bahan LKPJ KDH AMJ 2015, tersusunnya dokumen LAKIP dan IKK Biro Administrasi Pembangunan 2015, tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan 2016 dan draft Renja 2017, tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2016, serta draft RKT 2017, tersusunnya DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016, serta tersusunnya RKA Biro Administrasi Pembangunan 2017. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Administrasi Pembangunan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pengendalian Pembangunan tahun 2016 dan realisasi Renstra Biro Pengendalian Pembangunan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Biro Pengendalian Pembangunan dan/atau realisasi APBD adalah :

Pencapaian realisasi Fisik Program dan Kegiatan Biro Pengendalian Pembangunan tahun 2016 adalah 99,57 %.

Pada umumnya seluruh program dan kegiatan Biro Pengendalian Pembangunan pada TA 2016 dapat berjalan sesuai RKPD, Renja dan DPA serta mencapai sasaran yang ditetapkan, beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan permasalahan dan solusi sebagai berikut :

- Ketidaksiplinan OPD/Biro dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Bulanan (terlambat/tidak menyampaikan). Untuk itu telah disampaikan Surat Edaran ke OPD/Biro agar menyampaikan Laporan Capaian Kinerja tepat pada waktunya.



-
- Ketidaksiplinan OPD/Biro dalam kehadiran Desk Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, telah disampaikan Surat Peringatan kepada OPD/Biro terkait kehadiran Desk Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat.



Tabel 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Adanya Kesesuaian Rencana dengan Realisasi Anggaran	Deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana antara 0 s.d. – 5,99% atau kategori hijau	5,99%	5,99%	100	Kegiatan Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	350.000.000	331.985.000	94,85
						Kegiatan Asistensi RKA/DPA SKPD	189.575.000	163.761.000	86,36
2.	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Kab/Kota dan OPD/Biro dalam Pelaporan Kinerja	Prosentase Kab/Kota dan OPD/Biro yang menyampaikan laporan tepat waktu	90%	90%	100	Kegiatan Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat	250.000.000	248.954.200	99,58
						Kegiatan Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	700.000.000	693.164.011	99,02
						Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik	872.000.000	872.000.000	100
						Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi	1.011.425.000	1.011.080.000	99,97
						Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya	905.000.000	902.653.215	99,74
						Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan	920.000.000	917.504.464	99,73



3.	Ketersediaan draft Kebijakan Gubernur Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan Gubernur bidang Administrasi Pembangunan (Draft Pergub, Kepgub, Surat Edaran, Telaahan dsb)	19 Dokumen	19 Dokumen	100	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.453.000.000	1.403.419.201	96,59
						Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan	60.000.000	59.882.900	99,80



2.2 Analisis Kinerja Layanan Biro Pengendalian Pembangunan.

Capaian kinerja pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

IKK Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/303/OTDA tanggal 24 Januari 2011.

Capaian kinerja pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Biro Pengendalian Pembangunan belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan.

Capaian kinerja pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan berdasarkan IKK, dapat dilihat dalam tabel 2.2 pada lampiran dibawah ini.



Tabel 2.2
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2017	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2017		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1				Wajib									
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian									
1	20	29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat								
1	20	29	02	Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Melalui Evaluasi dan Estimasi	100%	100	94,80	94,80	100			
1	20	29	03	Asistensi RKA/DPA SKPD	Terasistensinya dan Terverifikasinya Penyusunan RKA/DPPA SKPD Perubahan Tahun 2016, RKA/DPA SKPD Tahun 2017 serta Terverifikasinya DPA SKPD APBD Tahun 2017	100%	100	84,91	84,91	100			
1	20	29	04	Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat	1. Terasistensinya dan terkoordinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTep lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2. Terasistensinya dan terkoordinasinya	100%	100	88,73	88,73	100			



Kode				Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2017	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2017		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
					Pemanfaatan Laporan SISMONEP lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi mengenai SISMONEP									
1	20	29	05	Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembangunan	100%		100	69,25	69,25	100			
1	20	29	06	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat			100	99,96	99,96	100			
1	20	29	07	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat			100	99,75	99,75	100			
1	20	29	08	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat			100	97,92	97,92	100			



Kode				Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2017	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2017		Catatan
1				2	3	4	5	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	9	realisasi capaian	tingkat capaian	12
								6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	20	29	09	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat			100	99,34	99,34	100			
1	20	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan									
1	20	60	06	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	-Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan			100	84,93	84,93	100			
1	20	66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase OPD yang Memperoleh Nilai CC Keatas									
1	20	66	06	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan	a. Tersusunnya DPA Biro Admbang b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2015 c. Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Admbang 2015 dan IKK 2015			100	99,68	99,68	100			



Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2017	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Admbang 2016 dan draft Renja 2017 e. Terusunnya Rencana Kinerja Tahunan Biro Admbang 2016, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan draft RKT 2017 f. Tersusunnya DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016 g. Tersusunnya RKA Biro Admbang 2017									



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pengendalian Pembangunan

Isu dan masalah strategis yang harus diselesaikan pada tahun rencana 2016 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Biro Pengendalian Pembangunan serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika pembangunan serta memperhatikan pada kekuatan dan kelemahan pada Biro Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar penentuan program dan kegiatan Dengan memperhatikan Evaluasi Kinerja tahun 2015 dan 2016, maka Isu Strategis Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2017 , sebagai berikut :

1. Ketepatan dan Kepatuhan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja
2. Proses Input SiRUP yang belum tepat waktu
3. Sarana dan Prasarana kurang mendukung.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.3 pada lampiran dibawah ini:



Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
1.	Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Melalui Evaluasi dan Estimasi		Rp.350.000.000	Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Melalui Evaluasi dan Estimasi		Rp.350.000.000	
2.	Asistensi RKA/DPA SKPD	Kota Bandung	Terasistensinya dan Terverifikasinya Penyusunan RKA/DPPA SKPD Perubahan Tahun 2016, RKA/DPA SKPD Tahun 2017 serta Terverifikasinya DPA SKPD APBD Tahun 2017		Rp.189.575.000	Asistensi RKA/DPA SKPD	Kota Bandung	Terasistensinya dan Terverifikasinya Penyusunan RKA/DPPA SKPD Perubahan Tahun 2016, RKA/DPA SKPD Tahun 2017 serta Terverifikasinya DPA SKPD APBD Tahun 2017		Rp.189.575.000	
3.	Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Bandung	1. Terasistensinya dan terkoordinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTOP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2. Terasistensinya dan		Rp.700.000.000	Penguatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Bandung	1. Terasistensinya dan terkoordinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTOP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2. Terasistensinya dan		Rp.700.000.000	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terkoordinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTOP lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi mengenai SISMONTOP					terkoordinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTOP lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi mengenai SISMONTOP			
4.	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembangunan		Rp.872.000.000	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembangunan		Rp.872.000.000	
5.	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.1.011.425.000	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.1.011.425.000	
6.	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.905.000.000	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.905.000.000	
7.	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.920.000.000	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan	Kabupaten /Kota di Jawa Barat	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat		Rp.920.000.000	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;	-Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan		Rp.1.453.000.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;	-Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan		Rp.1.453.000.000	
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;	a. Tersusunnya DPA Biro Admbang b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2015 c. Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Admbang 2015 dan IKK 2015 d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Admbang 2016 dan draft Renja 2017		Rp.60.000.000	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;	a. Tersusunnya DPA Biro Admbang b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2015 c. Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Admbang 2015 dan IKK 2015 d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Admbang 2016 dan draft Renja 2017		Rp.60.000.000	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			e. Terusunnya Rencana Kinerja Tahunan Biro Admbang 2016, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan draft RKT 2017 f. Tersusunnya DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016 g. Tersusunnya RKA Biro Admbang 2017					e. Terusunnya Rencana Kinerja Tahunan Biro Admbang 2016, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan draft RKT 2017 f. Tersusunnya DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2016 g. Tersusunnya RKA Biro Admbang 2017			



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program dan Kegiatan yang ada di Biro Pengendalian Pembangunan tidak ada yang berasal dari masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengendalian Pembangunan tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Biro Pengendalian Pembangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk melayani Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang fungsi lembaganya berhubungan dengan hal tersebut.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyerapan anggaran, Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kebijakan nasional untuk menjadi pejabat penghubung. Kebijakan nasional yang dilaksanakan Biro Pengendalian Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Adanya Surat Edaran Kantor Staf Presiden Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pengendalian Pembangunan

a. Visi dan Misi

Pada dasarnya Program dan Kegiatan pada Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu kepada berbagai kebijakan baik yang bersifat politis maupun yang bersifat teknis operasional untuk mencapai sasaran pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan akselerasi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Biro Pengendalian Pembangunan dalam program kerja lima tahunan memuat visi, misi, sasaran, tujuan, kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan yang tertuang dalam Renstra Biro Pengendalian Pembangunan.

Dalam rencana strategis tersebut telah dicanangkan **Visi** Biro Pengendalian Pembangunan yaitu **“Sebagai Unit Kerja Yang Akuntabel dalam Pengendalian Pembangunan di Jawa Barat”**. Adapun **Misi** yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan kebijakan umum Administrasi Pembangunan;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan fasilitasi Administrasi Pembangunan;
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja administrasi pembangunan.



Di dalam pelaksanaan tugas pengendalian program pembangunan di Provinsi Jawa Barat, Biro Pengendalian Pembangunan merumuskan Visi yang mengandung makna sebagai berikut :

Akuntabel adalah mampu dan bertanggungjawab. Aparatur yang kredibel senantiasa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga dari kinerjanya tersebut, akan menumbuhkan kepercayaan lingkungan disekitarnya.

Adapun tujuan pelaksanaan pengendalian Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 2013 – 2018 yaitu:

- a. Mewujudkan proses penyusunan kebijakan umum administrasi pembangunan yang berkualitas dengan pelibatan berbagai pihak pada bidang sosial budaya, ekonomi, pemerintahan dan fisik;
- b. Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan yang semakin optimal;
- c. Meningkatkan akurasi informasi dari hasil pemantauan lapangan, pengendalian serta evaluasi dan Laporan SKPD/OPD dalam kinerja Administrasi Pembangunan.

b. Sasaran dan Indikator Sasaran

Pencapaian visi dan misi Biro Pengendalian Pembangunan pada Tahun 2016 diimplementasikan selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan draft Kebijakan Gubernur Bidang Administrasi Pembangunan
- 2) Adanya kesesuaian antara rencana dengan realisasi anggaran
- 3) Meningkatnya Prosentase Kepatuhan OPD/Biro dalam Pelaporan Kinerja
- 4) Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Kab/Kota dalam Pelaporan Kinerja

c. Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Adapun kebijakan yang diperlukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Biro Pengendalian Pembangunan secara efisien dan efektif meliputi:



- 1) Koordinasi stakeholders dalam memberikan umpan balik kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) Fasilitasi pembinaan pengendalian dan evaluasi pembangunan antar OPD/Biro Pemerintah Daerah Provinsi;
- 3) Fasilitasi pembinaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi implementasi sistem informasi kinerja pembangunan daerah;
- 5) Fasilitasi implementasi sistem informasi kinerja pembangunan strategis.

Program dijabarkan dalam kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan program-program yang diperlukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- (1). Peningkatan intensitas pertemuan dengan stakeholders pembangunan;
- (2). Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (3). Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi;
- (4). Peningkatan fasilitasi, koordinasi, Pengendalian Pembangunan antar susunan pemerintahan;
- (5). Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
 - Kegiatan Asistensi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan
 - Kegiatan Analisis Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Sismontep Provinsi Jawa Barat
 - Kegiatan Penguatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat lingkup



- Pembangunan Fisik dan Ekonomi
 - Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat lingkup Pembangunan Pemerintahan
 - Kegiatan Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat lingkup Pembangunan Fisik dan Ekonomi
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Pekerjaan pada Kegiatan APBD lingkup Pembangunan Fisik dan Ekonomi
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Pekerjaan pada Kegiatan APBD lingkup Pembangunan Sosial dan Budaya
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Pekerjaan pada Kegiatan APBD lingkup Pembangunan Pemerintahan
 - Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Rencana Pekerjaan dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat
- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pengendalian Pembangunan
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- 4. Program Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat serta Koordinasi dan Konsultasi
 - Kegiatan Pelayanan Jasa Perkantoran
- 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Perkantoran
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Penyajian Program dan Kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel 3.3 pada lampiran dibawah ini.



Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	KET.
I.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		6.925.000.000	
	1.	Penguatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1.000.000.000	
	2.	Asistensi Dokumen Pelaksanaan Pembangunan	300.000.000	
	3.	Analisa Data & Pelapran Capaian Kinerja & Sismontep Provinsi Jawa Barat	1.500.000.000	
	4.	Penyusunan & Pengelolaan Rencana Pekerjaan pada Kegiatan APBD	600.000.000	
	5.	Pengendalian Pengelolaan Rencana Pekerjaan & Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	1.525.000.000	
	6.	Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	1.400.000.000	
	7.	Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat	600.000.000	
II.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.600.000.000	
	1.	Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	765.000.000	
	2.	Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	18.000.000	
	3.	Penyediaan Langgan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	502.000.000	



NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	KET.
	4.	Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	35.000.000	
	5.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pengendalian Pembangunan	80.000.000	
	6.	Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	200.000.000	
III.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur		60.000.000	
	1.	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	60.000.000	
IV.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		600.000.000	
	1.	Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	600.000.000	
		JUMLAH	9.185.000.000	



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Pengendalian Pembangunan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Biro Pengendalian Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Draft RKPD Provinsi Jawa Barat.

Memahami dari evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berusaha menetapkan Rencana Kerja Tahun 2017 agar program dan kegiatannya selalu dapat mendukung peningkatan pelayanan Biro Pengendalian Pembangunan terhadap publik maupun PNS dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis yang ada, Biro Pengendalian Pembangunan menciptakan ide-ide kreatif melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan agar lebih dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.

Rencana Kerja digunakan sebagai acuan bagi Biro Pengendalian Pembangunan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi jangka menengah daerah, dimana pelaksanaan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya berpatokan pada Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Biro Pengendalian Pembangunan dalam melaksanakan tugas.

Bandung, April 2017
KEPALA BIRO PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1 009